

FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN DIALOG JAKARTA – JAYAPURA ¹

Oleh: Sostenes Sumihe²

1. Mencermati kondisi sosial kemasyarakatan Papua akhir-akhir ini, maka Papua lebih merupakan sebuah “tanah konflik” daripada “tanah damai”. Kekerasan atas kemanusiaan yang membawa korban jiwa baik pada pihak masyarakat sipil maupun pada pihak aparat keamanan telah memberi kesan kuat, bahwa masalah konflik Papua itu serius. Situasi konflik ini bertentangan dengan deklarasi para pimpinan agama di Papua. Pada tanggal 5 Februari 2003 para pimpinan agama mendeklarasikan Papua “tanah damai”. Istilah ini hendak menjelaskan kondisi sosial kemasyarakatan yang diharapkan berlaku di Tanah Papua.

2. Para pimpinan agama memberikan 9 (sembilan) indikator Papua Tanah Damai. Kesembilan indikator itu adalah (1) partisipasi; (2) kebersamaan, toleransi dan saling menghargai; (3) komunikasi; (4) kesejahteraan; (5) rasa aman dan nyaman; (6) keadilan dan kebenaran; (7) kemandirian; (8) harga diri dan pengakuan; (9) keutuhan-harmoni. Kondisi dambaan ini bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh rasa takut, intimidasi, marginalisasi, stigmatisasi, alienasi, ketidakadilan, kemiskinan dan keterbelakangan. Situasi ini merupakan sebuah paradoks Papua yang memprihatinkan. Karena idealnya memang Papua mesti tanah damai, bukan tanah konflik seperti sekarang ini.

3. Ada beberapa alasan yang mendasari gagasan bahwa Papua seharusnya tanah damai. Pertama, kehadiran agama-agama dengan misi membawa rahmat dan keselamatan menjadi

¹ Disampaikan pada pertemuan LIPI, Jakarta, 13 Desember 2001.

² Direktur pascasarjana STT GKI I.S. Kijne, Jayapura.

landasan yang kuat bagi umat beragama untuk memperjuangkan terwujudnya kedamaian, keamanan, keadilan dan kesejahteraan di Tanah Papua. Ini menjadi alasan lahirnya deklarasi Papua Tanah Damai oleh para pemimpin agama itu. Namun, realitas Papua saat ini jauh dari yang didambakan itu. Tanpa mengabaikan peran agama-agama dalam pembangunan Papua, namun dengan rendah hati patut dicatat bahwa peran sosial agama-agama tidak cukup kuat untuk mewujudkan gagasan Papua Tanah Damai itu menjadi realitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Tanah Papua.

4. Kedua, potensi sumber daya alam Papua, yang digambarkan dalam sebuah lagu sebagai, “sungaimu mengalirkan emas”, pada dasarnya menjanjikan kepada masyarakat khususnya orang asli Papua sebuah kehidupan yang bebas dari kemiskinan. Kegiatan penambangan oleh Freeport saat ini menjadi bukti yang kuat, bahwa Papua memang mengalirkan emas dan memberikan harapan akan sebuah kehidupan yang sejahtera. Tetapi parakos dengan itu, realitas sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan di atas tanah yang kaya ini.

5. Ketiga, ada regulasi yang menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat mengusahakan kesejahteraan orang asli Papua, yaitu Undang Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Dalam kerangka Undang-undang ini Papua memiliki peluang yang sangat besar untuk terbebas dari keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan. Karena Otsus itu menekankan keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua. Pemberdayaan dan keberpihakan ini didukung pula oleh dana pembangunan yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sedikit.

6. Dengan keunggulan-keunggulan itu mestinya gagasan Papua Tanah Damai dapat diwujudkan. Namun, kenyataannya realitas Papua sekarang ini justru bertolakbelakang dengan gagasan tersebut serta kekayaan dan kekuatan yang dimilikinya. Ini

menimbulkan keprihatinan, tetapi sekaligus pertanyaan: Mengapa masyarakat Papua miskin di atas negeri yang kaya? Dan mengapa negeri yang seharusnya damai, justru penuh dengan ketegangan dan konflik? Ada masalah apa di Papua?

7. Dari berbagai studi mengenai masalah Papua, antara lain yang dilakukan oleh LIPI, yang dituangkan dalam buku Papua Road Map, dapat dicatat empat masalah dominan: masalah politik, kekerasan terhadap kemanusiaan, implementasi Otsus yang gagal dan marginalisasi orang Papua. Empat masalah ini sesungguhnya adalah masalah kemanusiaan. Karena keempat masalah itu bersentuhan dengan eksistensi manusia, khusus orang asli Papua. Masalah politik dan kekerasan yang menyertainya bersentuhan dengan identitas diri dan hak-hak dasar orang Papua. Otsus yang tidak cukup berhasil implementasinya itu adalah untuk kepentingan orang Papua. Semangat keberpihakan dan pemberdayaan untuk mengatasi ketertinggalan agar masyarakat menjadi subjek, bukan objek, pembangunan, ini juga tidak dapat dipisahkan dari masalah kemanusiaan Papua. Dengan semangat tersebut, dan apabila Otsus berjalan sebagaimana yang diharapkan serta ditunjang oleh dana pembangunan yang besar itu, maka dapat dibayangkan tidak akan ada marginalisasi, ketertinggalan, kemiskinan dan alienasi di Papua, terutama di antara orang asli Papua.

8. Apabila implementasi Otsus belum begitu berhasil, ini juga menunjukkan bahwa keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua gagal. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah ada ketidakseriusan dalam membangun kehidupan dan kesejahteraan orang asli Papua? apakah benar orang Papua bagian integral dari Indonesia, jangan-jangan hanya tanah Papua bagian dari republik ini, tetapi orang Papua sendiri adalah orang asing dan diperlakukan tidak seperti orang Indonesia? Maka sejauh yang saya pahami, masalah Papua yang paling substansial adalah masalah kemanusiaan; yaitu penghargaan terhadap harkat

kemanusiaan, jati diri dan hak-hak dasar orang Papua. Masalah ini bersentuhan dengan aspek politik, ekonomi, budaya dan agama, termasuk disini mengenai nilai-nilai hidup yang menggambarkan jati diri. Karena itu, saya menggarisbawahi pemikiran-pemikiran yang pernah dikembangkan oleh tokoh-tokoh Papua, antara lain Neles Tebay, bahwa yang harus dibangun adalah dialog kemanusiaan.

9. Sepintas lalu dialog kemanusiaan itu abstrak. Tetapi jelas fokusnya adalah manusia, yaitu manusia di dalam keutuhan hidupnya. Maka dalam dialog itu, manusia (dhi orang asli Papua) harus dilihat dan diterima dalam keutuhannya. Bukan hanya dilihat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan politik, melainkan juga sebagai masyarakat yang memiliki keprihatinan atas kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Jelas kiranya, bahwa dialog kemanusiaan itu bersifat komprehensif, dan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang memahami masalah Papua yang terkait dengan berbagai sektor kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

10. Dialog kemanusiaan tersebut tidak dapat dibatasi hanya pada tataran verbal saja. Dialog itu harus menjadi sebuah pertemuan di dalam karya pembangunan. Di sini dialog itu tidak hanya terbatas pada kelompok elit dalam masyarakat. Masyarakat yang ada di kampung-kampung adalah peserta utama dari dialog itu. Apa yang sudah dilakukan oleh Barnabas Suebu, mantan gubernur provinsi Papua, dengan RESPEK dapat dicatat sebagai bentuk dialog kemanusiaan berbasis pembangunan kampung. Di situ tidak hanya ada visitasi dan dialog dengan masyarakat, tetapi sekaligus memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri menjadi subjek dalam pembangunan. Seberapa besar RESPEK itu sudah berhasil, belum dapat ditentukan secara pasti. Akan tetapi, sebagai sebuah model dialog yang berbasis masyarakat terutama di kampung-kampung, dapat dikatakan model itu berhasil menjadikan

masyarakat mitra dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan.

11. Kesimpulan yang dapat dicatat mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dialog Jakarta-Jayapura adalah: pertama, dialog itu harus dibangun di atas dasar penghargaan dan penerimaan kemanusiaan manusia, yaitu orang asli Papua secara utuh. Kedua, konsep dialog itu tidak terbatas pada tataran verbal di kalangan elit, tetapi harus menjadi sebuah dialog di dalam praksis pembangunan bersama masyarakat. Ketiga, dialog itu harus bersifat komprehensif menyentuh semua aspek kehidupan: sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.